



► **KEMISKINAN DI DIY**

Tak Lagi Andalkan Bansos

Yosef Leon, David Kurniawan,
& Ujang Hasanudin
redaksi@harianjogja.com

JOGJA—Skema penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kulonprogo akan diubah dari berbasis bantuan sosial (bansos) menjadi perlindungan sosial seperti asuransi.

Skema perlindungan sosial dinilai mampu melindungi masyarakat Kulonprogo dan diharapkan meningkatkan kesejahteraan warga.

Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati, mengakui sulit menurunkan angka kemiskinan di Kulonprogo. "Dari kemarin-kemarin alokasinya itu selalu bantuan. BLT, BPNT, PKH dan sebagainya, kemudian BLT di tingkat kalurahan, ini berusaha kami alihkan," katanya, Sabtu (21/1).

Akhid menambahkan pengalihan ini diarahkan ke skema perlindungan yang lain seperti perlindungan bagi warga yang bekerja sebagai penderes kelapa dalam bentuk premi pembayaran BPJS informal.

Harapannya, kata Akhid, skema perlindungan semacam ini bisa mengcover lebih banyak lagi masyarakat Kulonprogo. Tidak hanya penderes di Kokap dan Samigaluh, tetapi menyebar ke wilayah lainnya serta menaungi beragam pekerjaan.

► Halaman 10

Tak Lagi...

"Bisa saja kita tambah menjadi pekerja lainnya. Apakah itu pekerja pembantu rumah tangga atau kemudian pekerja infrastruktur level bawah dan juga para petani dan sebagainya. Sehingga di Kulonprogo harapannya tidak lagi mengharap bantuan, tapi kemudian terciptanya sebuah perlindungan-perindungan sosial," ujarnya.

Perlindungan lainnya dapat berwujud beasiswa, perlindungan sakit, perlindungan tenaga kerja dan sebagainya. Dengan demikian diharapkan Akhid, akan tumbuh optimisme warga untuk berusaha dan bila ada sesuatu yang menimpa keluarganya perlindungan dari Pemerintah Pusat sudah mengcover mereka.

Fokus Intervensi

Pemerintah Kota Jogja mengaku fokus pada intervensi program penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi persoalan penduduk miskin di wilayahnya. Program lama yang sudah berjalan dan terbukti cukup efektif akan dilanjutkan semisal kebijakan *Gandeng-Gendong*, ditambah dengan keterlibatan seluruh OPD untuk mengoptimalkan upaya mengurangi penduduk miskin.

"Berbagai program yang sudah dilakukan tetap diteruskan dalam kerangka penanggulangan kemiskinan, namun sarannya akan kami perjelas," kata Sekretaris Daerah Kota Jogja Aman Yuridijaya, Jumat (20/1).

Menurutnya, upaya penanggulangan penduduk miskin pun tidak hanya dilakukan lewat program-program yang sifatnya struktural semata melainkan lebih kepada melibatkan seluruh OPD

untuk ikut ambil bagian dalam menekan angka kemiskinan itu. "Program apa pun kita upayakan agar intervensi sarannya diperjelas bagi masyarakat yang memang kategori tidak mampu," jelas dia.

Pemkab Gunungkidul berkomitmen untuk mengurangi jumlah keluarga miskin di Bumi Handayani. Total hingga sekarang jumlahnya mencapai 72.611 kepala keluarga (KK).

Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul, Ajie Saksiono, mengatakan secara umum jumlah keluarga miskin di Gunungkidul mengalami penurunan. Pada 2021, jumlahnya mencapai 17,69% tapi setahun berikutnya menjadi 15,86%.

Meski ada penurunan, ia mengakui masih banyak tugas yang harus diselesaikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Ia menjabarkan untuk keberadaan keluarga miskin berada di seluruh kapanewon. Meski demikian, untuk sasaran program difokuskan di tujuh kapanewon yang meliputi Saptosari, Playen, Gedangsari, Nglipar. Selain itu, ada Kapanewon Ponjong, Tepus, dan Karangmojo.

"Data warga miskin ini sudah kami distribusikan ke masing-masing kalurahan untuk mendapatkan program Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa. Untuk pengentasan juga akan melibatkan peran dari kabupaten, provinsi maupun Pemerintah Pusat melalui berbagai program mulai dari jaminan sosial, kesehatan hingga pemberdayaan masyarakat," katanya.

Tak Risau

Bupati Bantul, Abdul Halim

Muslih, mengaku tidak risau Bantul disebut sebagai daerah miskin. Sebab, indeks kebahagiaan di Bumi Projomansari termasuk tinggi.

"Saya tidak terlalu risau bahwa DIY dikatakan miskin. Mengapa saya tidak risau, karena jaminan sosial untuk masyarakat miskin terus kami siapkan dan sediakan," kata Halim.

Kendati angka kemiskinan tinggi berdasarkan data dari Kementerian Sosial dan penghitungan Badan Pusat Statistik (BPS), faktanya angka kemiskinan di Bantul sulit ditemukan.

Ia mencontohkan angka kemiskinan ekstrem di Bantul ada sekitar 27.510 orang berdasarkan data Kementerian Sosial. Pihaknya sudah memerintahkan pemerintah kalurahan untuk menyisir warga miskin, tetapi warga miskin semua sudah tercover bantuan.

"Angka 27.000-an miskin ekstrem itu dalam jumlah itu sulit, saya sudah tugaskan lurah walau ditemukan angkanya tidak sebesar yang diekspos 27.000-an," ujarnya.

Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo yang juga sebagai ketua Satgas Penanganan Kemiskinan Bantul mengaku diminta mencapai target nihil kemiskinan ekstrem pada 2024.

"Saat ini angka kemiskinan ekstrem Bantul 27.730 jiwa, tertinggi kedua setelah Gunungkidul. Jumlah tersebut turun sedikit jika dibandingkan tahun sebelumnya," kata Joko.

Joko mengaku sudah memerintahkan sejumlah organisasi perangkat daerah termasuk pemerintah kalurahan untuk mendaftarkan kembali angka kemiskinan ekstrem.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005